

**PEMAHAMAN MAHASISWA GENERASI Z DI  
LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA  
TENTANG HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMERINTAH  
DAN RAKYAT DALAM KONSEP DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Langsa  
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

NAMA : AZHILA BALQIS  
NIM : 2032019040  
FAKULTAS : SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAN NEGERI (IAIN)  
LANGSA2023 M / 1444 H**

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

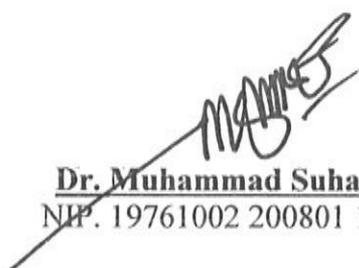
**Pemahaman Mahasiswa Generasi Z Dilingkungan Fakultas Syariah IAIN  
Langsa Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan  
Rakyat Dalam Konsep Dusturiyah Oleh:**

**Azhila Balqis**  
**NIM : 2032019040**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Menyetujui

**Pembimbing I**

  
**Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA**  
NIP. 19761002 200801 1 009

**Pembimbing II**

  
**Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh**  
NIP.198505082018031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Pemahaman Mahasiswa generasi Z Di Lingkungan Fakultas Syariah IAIN Langsa tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Dalam Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Dalam Konsep Siyasa Dusturiyah” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah jurusan/prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 27 Juli 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 4 Agustus 2023

Panitia sidang Munaqasyah

Skripsi Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua

  
Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA.  
NIP. 19761002 200801 1 009

Sekretaris

  
Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh  
NIP. 19850508 20180 3 1001

Anggota-anggota :

  
Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., MA  
NIP. 19850401 201801 1 002

  
Ammah, M.H  
NIP. 19890725 201903 2 011

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azhila Balqis  
NIM : 2032019040  
Tempat/Tanggal lahir : Langsa, 22 Juni 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Langsa, Gp.Meutia

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemahaman Mahasiswa Generasi Z Dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Langsa Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Dalam Konsep Dusturiyah”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa 22 Juni 2023



  
Azhila Balqis

10000  
METERAI  
TEMPEL  
FOFAKX533879414

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan judul skripsi ” Pemahaman Mahasiswa Generasi Z Di Lingkungan Fakultas Syariah IAIN Langsa Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Dalam Konsep Dusturiyah.” Dengan berbagai ikhtiar dan doa maka selesailah penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak di antaranya :

1. Kepada orang tua yang senantiasa memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moril, materil, spiritual yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Langsa.
2. DR. H.Basri,M.A selaku Rektor Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr.Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa juga sebagai Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc.MA selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa.
5. Bapak Dr.H.Muhammad Suhaili Sufyan, Lc dan Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan dosen prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana, *see you when i see you all*
8. Kepada support systemku Farah, Raihan, Nabila, dan Kak Una yang senantiasa selalu mengingatkanku bahwa kalian selalu bersedia untuk meminjamkan telinga kalian dalam setiap keadaan, *thank you for being such kindest in this cruel world.*

9. Kepada Bang Andra, dan kedua adik laki-laki ku Zidant, dan Zabier terima kasih untuk canda dan tawa juga suka dan duka yang kalian berikan, kalian adalah saudara terbaik yang ku miliki.
  10. Kepada teman seperjuangan ku Atun, Fitria, Amel, dan Novi ayo melangkah bersama dalam mewujudkan mimpi ini dan terima kasih untuk selalu tidak menyerah pada mimpi kita masing-masing.
  11. Terima kasih kepada 23 peri terbaik hidup ku NCT, *thank you for saving my life to through thick and thin, you guys have no idea how much you brings joy to my life, thank you for riding this roller coaster-life with me.*
  12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hardwork, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being giver and tryna to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right, I wanna thank me for always growing to be kinder person.*
- Dan dengan demikian penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu segala kritikan dan saran yang baik juga sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam memanfaatkannya.
- Wassalamu'alaikum wr.wb*

Langsa 20 Januari 2023

Penulis

**Azhila Balqis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Penjelasan Istilah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat .....	15
E. Batasan Masalah .....	15
F. Kajian Pustaka .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>19</b>
A. Kerangka Teoritis .....	19
B. Teori Fiqih Dusturiyah.....	22
C. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah .....	23
D. Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	25
E. Sejarah Singkat Generasi Z .....	27
F. Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	29
G. Hak dan Kewajiban Pemerintah Dan Rakyat .....	35
H. Hak dan Kewajiban Dusturiyah .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45

D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Penggumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV Hasil Penelitian .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Visi Misi Jurusan Hukum Tata Negara.....	51
C. Sturktur Prodi Hukum Tata Negara .....	53
D. Deskripsi Temuan Penelitian .....	54
E. Perspektif Mahasiswa Generasi Z Fakultas IAIN Langsa Dalam mempelajari Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat..	54
F. Pemahaman dan Persepsi Hubungan Timbal Balik Konsep Siyasah Dusturiyah .....	60
G. Persepsi Terhadap Aspirasi Rakyat.....	62
H. Hubungan Timbal Balik Di Indonesia Konsep Siyasah Dusturiyah...	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Struktur Prodi Hukum Tata Negara.....	53
--	----

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Pertanyaan Wawancara.....	72
Lampiran Hasil Wawancara.....	73
Lampiran Hasil Dokumentasi Penelitian.....	85

## ABSTRAK

Fakta penelitian UNESCO mencatat bahwa Indonesia adalah negara urutan kedua terbawah soal literasi dunia, hal ini menjelaskan bahwasanya minat baca Rakyat Indonesia sangat memprihatinkan dimana hanya 0,001% dari 1000 orang yang tinggal di Indonesia hanya 1 orang yang rajin dalam membaca, karena hal inilah penulis sebagai peneliti tertarik untuk mengangkat isu sosial ini. Penelitian ini termasuk dalam jenis metode penelitian kualitatif, kategori jenis penelitian hukum empiris normatif menggunakan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Mahasiswa prodi Hukum Tata Negara memahami hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat. Deskripsi temuan penelitian ini dibagi dalam 4 pembahasan yaitu pertama Perspektif Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah Iain Langsa dalam mempelajari Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat, Kedua Pemahaman dan Persepsi terhadap Hubungan Timbal Balik Dalam Konsep Dusturiyah, ketiga Persepsi Terhadap Aspirasi Masyarakat, dan keempat Hubungan timbal balik di Indonesia saat ini apakah sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah bahwa mahasiswa generasi z Hukum Tata Negara memahami dengan baik maksud dari hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam konsep dusturiyah. Pada perspektif fiqh dusturiyah dijelaskan bahwa hubungan timbal balik adalah Pemerintah memberikan hak dan kewajibannya kepada Rakyat dengan sebaik mungkin sehingga mencapai kemaslahatan kepada rakyatnya.

**Kata Kunci : Pemahaman, Generasi Z, Hubungan Timbal Balik, Pemerintah Dan Rakyat.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebuah respon akan terlihat dari elit politik, mahasiswa, serta masyarakat umum jika kesejahteraan umum terganggu oleh suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat berfungsi sebagai komunikator politik ketika berhadapan dengan berita-berita politik yang muncul di berbagai media massa.

Media dan teknologi yang terus berkembang juga mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku setiap generasi. Kondisi ini juga berlaku pada bagaimana sebuah ekspektasi yang diandalkan bahwa setiap generasi akan mewarnai Pemerintahan. Selain itu, dampak luasnya pengetahuan masyarakat terhadap berbagai faktor juga kontribusi generasi Z adalah hal yang paling signifikan terhadap perubahan bagi negara karena mereka lah yang nantinya akan menjadi sebagai calon pemimpin bangsa yang akan membawa perubahan.

Terlebih mahasiswa adalah *agent of change* dimana mahasiswa harus dapat membawa perubahan positif dan konstruktif melalui perkembangan teknologi, dan juga yang membawa perubahan untuk bangsa dan negara. Selain itu mahasiswa juga bertanggung jawab sebagai *gate keeper* yaitu orang yang dianggap memiliki informasi lebih dibandingkan masyarakat.

Dari sini dapat di artikan bahwasanya fungsi mahasiswa dalam lingkungan sosial sangatlah penting, dalam kontrol sosial. Mahasiswa berfungsi untuk menyuarakan hal yang bertentangan dalam nilai keadilan di dalam masyarakat.

Terciptanya suatu hubungan timbal balik tidak akan terwujud apabila Pemerintah juga tidak pada jalan yang benar. Apabila sikap Pemerintah otoriter, Rakyat dapat melakukan protes dengan kritikan dan saran yang membangun.

Zaman yang terus berkembang saat ini juga banyak menimbulkan rasa keacuhan terhadap Rakyat dalam urusan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat. Posisi Pemerintahan secara konstitusi sebagai pemegang kekuasaan dan juga dalam konsep negara yang demokrasi kekuasaan adalah milik Rakyat dan Pemerintah hanya sebagai petugas dalam penyelenggaraan negara yang bisa ditarik kapan saja<sup>1</sup>.

Indonesia masih sangat banyak membutuhkan buku-buku yang berisi informasi yang luas dan membahas secara dalam tentang Hukum Tata Negara. Sehingga muncullah pertanyaan pada peneliti melihat fenomena ini apakah mahasiswa saat ini benar-benar memahami hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat. Melihat dari hukum Indonesia yang saat ini memegang sistem hukum demokrasi hal ini merupakan sebuah respon yang positif sebagai upaya untuk memerlukan mahasiswa generasi Z yang memiliki pemahaman yang kritis terutama mahasiswa generasi Z yang mempelajari Hukum Tata Negara.

fiqih siyasah dusturiyah membahas kenegaraan yang mengurus pemerintahan juga politik yang pada pembuatan kebijaksanaan dalam aturan kepengurusan kehidupan manusianya mewujudkan kemaslahatan pada rakyat, Permasalahan kemasyarakatan atau kerakyatan umat islam membutuhkan ilmu fiqih siyasah<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Shandi Patria Airlangga, *Hakikat Penguasa Dalam Hukum Demokratis*( Lampung: 2019),Hlm. 8

<sup>2</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 9-11

dimana hukum islam selalu berlaku efektif dalam kerakyatan sesuai yang telah diatur dalam fiqh siyasah.

Pengaturan dan Perundang- Undanganyang dituntut oleh hal-hal kenegaraan dari segi penyesuaiannya dengan pokok agama merupakan dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya<sup>3</sup>. Terdapat 3 objek kajian siyasah *pertama* adalah tentang peraturan dan perundang-undangan, *kedua* pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan yang *ketiga* pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan hubungan antara Rakyat dan penguasa dan kemudian hak dan kewajiban.

Apabila muncul sikap apatis dalam kalangan mahasiswa generasi Z hal ini bisa berdampak besar bagi Rakyat, Mahasiswa yang kehilangan simpati ini akan menimbulkan hal-hal negatif di mulai dari kesenjangan dan perpecahan terhadap generasi bangsa saat ini dan untuk generasi selanjutnya, kehilangan kontrol sosial, dan kurangnya rasa kesadaran yang kolektif serta rasa solidaritas. Dari hal inilah dibutuhkan pemikiran yang kritis dalam mahasiswa dimulai dari memahami hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat.

Selain itu fakta penelitian UNESCO<sup>4</sup> mencatat bahwa Indonesia adalah negara urutan kedua terbawah soal literasi dunia, hal ini menjelaskan bahwasanya minat baca Rakyat Indonesia sangat memprihatinkan dimana hanya 0,001% dari 1000

---

<sup>3</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang : Pustaka RiZki Putra, 1997) Hlm. 30.

<sup>4</sup>Kominfo, *Malas Baca Tapi Cerewet Di Medsos (10 oktober 2017)*, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media), diakses (5April 2023)

orang yang tinggal di Indonesia hanya 1 orang yang rajin dalam membaca, karena hal inilah penulis sebagai peneliti tertarik untuk mengangkat isu sosial ini.

Bedasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pemahaman Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah IAIN Langsa Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Dalam Konsep Dusturiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa fakultas syariah generasi Z terhadap hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat ?
2. Apakah hubungan timbal balik di Indonesia sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah ?

## **C. Penjelasan Istilah**

### **a. Pemahaman**

- Pemahaman menurut Anas Sudijono<sup>5</sup> Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan melihatnya dari berbagai sudut.
- Pemahaman Mahasiswa peneliti ingin membahas cara sudut pandang mahasiswa dalam memahami hubungan timbal balik yang terjadi antara Pemerintah dan Rakyat.

---

<sup>5</sup>Rofei, *Pengertian Pemahaman menurut Para Ahli*, ( 2011), <http://akmapala09.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-paraahli.html>, (5 April 2023)

b. Generasi Z

- Generasi Z adalah generasi yang lahir pascamilenial pada tahun 1996-2012. Teori generasi ini berasal dari Karl Mannheim<sup>6</sup>, generasi ini dikenal karena generasi yang begitu lahir sudah dekat dengan internet.

c. Hubungan timbal balik

- Hubungan timbal balik menurut John L. Gillin<sup>7</sup> adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dan adapun menurut Soejorno Soekanto<sup>8</sup> kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka hubungan tersebut adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.
- Hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat peneliti ingin membahas bagaimana hubungan antara Pemerintah dan Rakyat dalam kesatuan manusia yang hidup bersama sesuai perspektif fiqih dusturiyah.

---

<sup>6</sup> Hermawati Sitepu, *generasi Z*, Scribd, (15 Juli 2021), <https://id.scribd.com/document/515905215/Generasi-Z> diakses 5 Januari 2023

<sup>7</sup> Itsna Fauziyah Khamid, *Meningkatkan Interaksi Sosial Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Social Play*, (Indonesian Journal Of Guidance And Counseling: Theory And Application, 2015), Hlm. 22

<sup>8</sup>Soejorno Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, ( Jakarta : Rajawali, 1998), Hlm. 4

d. Pemerintah

- Pemerintah merupakan struktur politik kongkrit yang paling penting dalam pengelolaan negara. Kata pemerintah diturunkan dari bahasa latin yaitu *gubernare* yang artinya mengarahkan. Menurut Apter<sup>9</sup> pemerintah adalah sekumpulan khusus individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan atau mengadaptasi sistem yang mereka menjadi bagian di dalamnya.

e. Rakyat

- Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menuliskan pengertian Rakyat adalah sebagai penduduk sebuah negara.

f. Fiqih dusturiyah

- Fiqih siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas Perundang- Undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang- Undang dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi ( cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> David E Apter, *Politik Modernisasi*, (Jakarta : gamedia, 1987), Hlm.237

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

##### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana padangan generasi Z terhadap hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik yang dijalankan di Indonesia sudah sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah atau tidak.

##### 2. Manfaat

###### a. Manfaat teoritis

- a. Memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara/ fiqh Siyasah
- b. Mampu memberikan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat.

###### b. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis tentang fiqh siyasah/ Hukum Tata Negara
- b. Memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat yang ingin memperdalam ilmu Hukum Tata Negara.
- c. Dapat menjadi bahan masukan kepada para peneliti lainnya yang juga berkaitan dengan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat.

#### **E. Batas masalah**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak meluas juga kekeliruan dan kesalahpahaman maka perlu dijelaskan secara

singkat bahwa agar lebih efisien dan lebih terarah adapun pembatasan masalah yang diteliti terbatas pada mahasiswa generasi Z prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Iain Langsa.

## F. Kajian Pustaka

Kajian ini berangkat dari para peneliti peneliti sebelumnya yang berguna untuk sebagai acuan serta pijakan hingga memberikan kejelasan informasi yang diteliti sebagaimana berikut :

- 1) Analisis Fiqih Siyasa Dusturiyah Terhadap Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dalam Mewujudkan Prinsip Good And Open Government Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana prinsip – prinsip atau nilai–nilai yang harus dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip *universal* yang didukung oleh negara negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lainnya. Menurut skripsi ini Pemerintahan ideal adalah Pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai–nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran (*al-amanah*), keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawah*), control (*amr bin al-ma'ruf naby al munkar*). Dari prinsip–prinsip tersebut Islam menyesuaikan diri secara substansif terhadap negara yang menghadapi sistem hukum barat salah satunya Indonesia .<sup>11</sup> Oleh karena itu Pemerintah

---

<sup>11</sup>Yudi Latif, *Islam, Negara, Society: Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta : Paramadina , 2005 ), Hlm 89.

harus menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan agar terciptanya Pemerintahan yang baik dan menimbulkan hubungan timbal balik yang baik dari Rakyat.

2) Pemikiran Politik Raja Ali Haji Tentang Kepemimpinan (Studi Hubungan Rakyat Dan Pemimpin)

Skripsi yang ditulis oleh peneliti yang bernama Dwi Arum Mutia ini meneliti tentang teori-teori dan pemikiran-pemikiran tokoh tentang politik, filsafat negara, Rakyat, dan juga etika kemanusiaan. Pemimpin merupakan unsur yang penting dalam pembentukan sebuah negara, aktivitas dan kebijaksanaan negara hanya dilakukan oleh pemimpin Pemerintahan. Juga membahas bagaimana menciptakan Pemerintah yang baik menurut pemikiran Raja Ali Haji. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjadi Pemerintah yang baik, Raja Ali Haji<sup>12</sup> menginginkan kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam dimana seorang pemimpin tidak boleh bertindak semena-mena dan pemimpin harus berusaha mencapai kemaslahatan umum dan menjauhkan Rakyatnya dari kemaksiatan. Dan pada masa Raja Ali Haji merupakan sebuah puncak kejayaan kerajaan, dimana pemimpin yang bagus akan menciptakan Rakyat yang bagus sehingga Rakyat makmur dan sejahtera.

---

<sup>12</sup>Muhammad Lazim, Corak Pemikiran Politik Raja Ali Haji, *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol 2 No 2, (Kepulauan Riau: 2 juni 2019), Hlm. 18

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.
- BAB II: Kerangka Teori, Sejarah Singkat Generasi Z, Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat Perspektif Siyasah Dusturiyah, Pemerintah dan Rakyat dan Hak Rakyat.
- BAB III: Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data, Gambaran Umum Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat.
- BAB IV : Hasil Penelitian Pemahaman Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah IAIN Langsa Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Dalam Konsep Dusturiyah, Dan Hubungan Timbal Balik Di Indonesia konsep siyasah Dusturiyah.
- BAB V : Penutup, Kesimpulan, dan Saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Institut Agama Islam Negeri Langsa tepatnya pada fakultas Syariah. Institut ini memiliki beberapa fakultas di antaranya adalah fakultas FTIK (Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan), FASYA (Fakultas Syariah), FUAD (Fakultas Ushuludhin Adab Dan Dakwah), dan FEBI (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam). Secara khusus penelitian ini di lakukan di fakultas syariah (FASYA) dan berfokus pada jurusan Hukum Tata Negara<sup>76</sup>.

Bedasarkan hasil observasi penelitian pada tanggal 7 mei 2023, Fakultas Syariah Iain Langsa memilki beberapa jurusan didalamnya, diantaranya adalah Hukum Ekonomi Islam (HES), Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Tata Negara (HTN), dan Hukum Pidana Islam (HPI). Fakultas syariah ini memiliki 3 lantai, pada lantai 1 terdapat ruang dekanat, ruang dosen, ruang akademik, prodi masing-masing jurusan, dan pada lantai 2 dan 3 terdapat kelas-kelas untuk proses belajar.

#### **B. Visi Misi Jurusan Hukum Tata Negara**

Jurusan Hukum Tata Negara memilki visi misi yang jelas<sup>77</sup>.

##### **Visi :**

Mejadi kiblat kajian Hukum Tata Negara islam di asia tenggara dengan karakter pendidikan rahmatan lil 'alamin pada tahun 2034.

---

<sup>76</sup>Profil IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, <https://iainlangsa.ac.id/>, (22 Juni 2023).

<sup>77</sup> Profil Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, <http://syariah.iainlangsa.ac.id/hukum-tata-negara/>, ( 22 Juni 2023)

**Misi:**

1. Mengembangkan pendidikan Hukum Tata Negara Islam yang berkarakter *rahmatan lil 'alamin* dengan mengintegrasikan fikih dan perundang-undangan
2. Melaksanakan penelitian dan penerbitan jurnal dan penulisan buku berstandar nasional dan internasional
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Hukum Tata Negara Islam secara berkesinambungan
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan program studi
5. Meningkatkan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Melaksanakan kegiatan akademik, administrasi dan informasi berbasis IT
7. Mendorong keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pelestarian lingkungan pengembangan bakat dan minat.

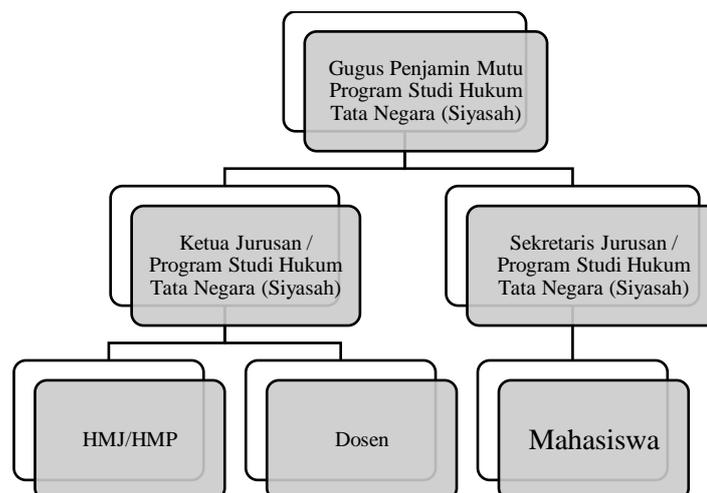
**Tujuan:**

1. Terwujudnya Pendidikan yang berkarakter *rahmatan lil 'alamin* dan melahirkan sarjana yang menguasai fikih dan Perundang-Undangan secara integratif;
2. Terpublikasinya karya ilmiah dalam bidang Hukum Tata Negara Islam yang berstandar nasional dan internasional;
3. Terwujudnya sentra pembinaan umat dalam bidang Hukum Tata Negara Islam yang terkemuka pada program studi Hukum Tata Negara;
4. Terbangunnya hubungan kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak;

5. Meningkatnya kualifikasi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Terwujudnya sistem pengelolaan akademik, administrasi dan informasi berbasis IT;
7. Terciptanya budaya pelestarian lingkungan dan prestasi mahasiswa.

### C. Struktur Prodi Hukum Tata Negara

Struktur organisasi Prodi Hukum Tata Negara ini terdapat beberapa bagian utama. Peran utama dalam struktur prodi adalah posisi sebagai Gugus Penjamin Mutu Program Studi Hukum Tata Negara lalu dilanjutkan oleh Ketua Jurusan / Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) kemudian dilanjutkan dengan Sekretaris Jurusan / Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Berikut adalah bagan struktur Prodi Hukum Tata Negara <sup>78</sup>:



**Tabel 4.1 : Struktur Prodi Hukum Tata Negara**

**Sumber : Prodi Hukum Tata Negara**

<sup>78</sup> Profil Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, <http://syariah.iainlangsa.ac.id/hukum-tata-negara/>, ( 22 Juni 2023)

#### **D. Deskripsi Temuan Penelitian**

Deskripsi temuan penelitian ini dibagi dalam 4 pembahasan yaitu *pertama* Perspektif Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah Iain Langsa dalam mempelajari Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat, *Kedua* Pemahaman dan Persepsi terhadap Hubungan Timbal Balik Dalam Konsep Dusturiyah, *ketiga* Persepsi Terhadap Aspirasi Masyarakat, dan *keempat* Hubungan timbal balik di Indonesia saat ini apakah sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah

##### **a. Perspektif Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah Iain Langsa Dalam Mempelajari Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat**

Perspektif mahasiswa Hukum Tata Negara generasi Z terhadap hubungan timbal balik merupakan sebuah hal yang penting untuk dimiliki oleh mahasiswa Hukum Tata Negara generasi Z dimana hal ini sangat sesuai dengan visi dan misi pada prodi Hukum Tata Negara yang menjelaskan supaya terwujudnya pendidikan Hukum Tata Negara Islam yang berkarakter *Rahmatan Lil'alamin* dan melahirkan sarjana yang menguasai fikih dan Perundang-Undangan secara integratif.

Bedasarkan data hasil wawancara peneliti dengan informan/narasumber ada masing-masing dari informan/narasumber menyampaikan perspektifnya mengenai pentingnya mahasiswa prodi Hukum Tata Negara generasi Z dalam memahami hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat menurut informan Alfinas Qhadafi selaku Ketua Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara "menurut saya sebagai mahasiswa prodi Hukum Tata Negara generasi Z yang

kelak akan membawa banyak perubahan sangat penting dalam memahami bagaimana hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat”<sup>79</sup>.

Alasan yang menguatkan mengapa pentingnya mahasiswa Hukum Tata Negara generasi Z penting dalam memahami hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat adalah saat ini banyak pihak politik yang mulai menyadari bahwa generasi Z menjadi modal dalam memberikan suara pada pemilihan. Berdasarkan dari sensus penduduk dibuktikan bahwasanya penduduk Indonesia menjadi salah satu yang menjadi populasi generasi Z terbesar<sup>80</sup>.

”Mempelajari hubungan timbal balik ini sangat penting karena sebagai generasi penerus bangsa kita perlu tahu apa yang sedang terjadi di negara ini karena nantinya kita ini adalah anak bangsa yang membawa perubahan.”<sup>81</sup> Perbedaan mendasar juga signifikan antara generasi Z dan generasi lainnya adalah penguasaan informasi dan teknologi<sup>82</sup> Hal ini mempengaruhi generasi Z dalam berfikir dan pandangannya terhadap berbagai hal.

”Belajar hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat ini penting sekali karena kita sebagai anak hukum harus faham apa saja yang menjadi permasalahan tata negara ini terutama berbicara hak dan kewajiban yang akan mensejahterakan Rakyat”<sup>83</sup>.

---

<sup>79</sup>Alfinas Qhadafi, Ketua HMJ Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa, 8 mei 2023.

<sup>80</sup>Mohammad Arif Rakhman dan Haryadi, 'Perilaku dan Partisipasi Politik Generasi Z', *Jurnal Sosial Ilmu Politik (JISIP)*, Vol 3 No 1 (2019), Hlm.30.

<sup>81</sup>Muhammad Yunus, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa, 8 mei 2023

<sup>82</sup>Rini Setiyowati, Alfiandra, Edwin Nurdiansyah, Pendidikan Politik Generasi Z di Era Distrupsi, *Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, Vol 9 No 1, Hlm.95

<sup>83</sup>Basma Hajar Asri Tiba, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa 10 mei 2023.

Bedasarkan UNESCO<sup>84</sup> minat baca buku di Indonesia berada di urutan ke 60 dari 61 negara, maka sebagai mahasiswa hukum tata negara bergenerasi Z yang mempunyai peran sebagai *agent of change* sudah sepatutnya untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam menerima informasi dan menyerap informasi lalu menyuarakan informasi yang di dapatkan sebaik mungkin.

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan/narasumber mengenai perspektif mahasiswa generasi Z prodi Hukum Tata Negara peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa generasi Z benar-benar mereka sadar akan sebagai generasi yang membawa perubahan bagi bangsa dan negara karena itu menurut informan/narasumber perlu untuk mempelajari hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.

#### **b. Pemahaman Dan Persepsi Terhadap Hubungan Timbal Balik Dalam Konsep Dusturiyah**

Konsep pemahaman menurut Rosmawati Pemahaman konsep adalah yang berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran, dimana siswa tidak hanya sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mampu mengaplikasikannya kembali<sup>85</sup>.

Sedangkan menurut KBBI Pemahaman adalah sebuah proses atau cara perbuatan dalam memahami atau memahamkan, dimana arti dari kata paham

---

<sup>84</sup>Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos (Jakarta), 10 Oktober 2017, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/>

<sup>85</sup>Rosmawati, Putri, dan Irwan, *Pemahaman Konsep Matematika Pada Materi Turunan Melalui Pembelajaran Probing*, 'Jurnal Pendidikan Matematika', Vol 1 No 2((2012), Hlm.68-72.

sendiri adalah mengerti. Secara istilah *dusturiyah* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama Pemerintah dan Rakyat dalam sebuah negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis<sup>86</sup>.

Peneliti juga bertanya kepada informan/narasumber tentang definisi hubungan timbal baliky yang dipahami oleh informan/narasumber”hubungan timbal balik itu setau saya adalah hubungan ketika kita melakukan sesuatu, Sesuatu itu akan kembali lagi kepada kita, Sedangkan hubungan timbal balik berdasarkan konsep *dusturiyah* adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh hak rakyat dan kewajiban rakyat dijalankan dengan baik.”<sup>87</sup>

Setelah memperoleh haknya Rakyat, Maka Rakyat memiliki kewajiban diantaranya adalah menaati Pemerintah. Dalam menaati Pemerintah bukanlah sesuatu yang harus mutlak Pemerintah wajib diikuti dan ditaati selama Pemerintah menjalankan kebijakan Pemerintahan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Apabila Pemerintah tidak melakukan penerapan kebijakan Pemerintahan dengan baik maka Rakyat tidak berkewajiban dalam menaati Pemerintah. Karena itu dalam memberikan aspirasi kepada Pemerintah sangat dibutuhkan dalam hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyatnya.

”Hubungan timbal balik dalam fiqih *dusturiyah* itu membahas tentang kesejahteraan rakyat dengan hak dan kewajiban yang diberikan dengan baik,

---

<sup>86</sup>Muhammad Edwar Rinaldo, dan Hervin Yoki Pradikta, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tranding In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, jurnal Hukum Konstitusi, Vol 1 No 1 (2021), Hlm.75

<sup>87</sup>Alfinas Qhadafi, Ketua HMJ Hukum Tata Negara Generasi Z, wawancara pribadi, Langsa 8 Mei 2023

Apabila hak rakyat diberikan dengan baik maka kewajiban rakyat adalah mematuhi aturan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah dengan baik”<sup>88</sup>.

Hak Rakyat dan kewajiban juga prinsip Rakyat merupakan sebuah kunci dari hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat, Keadilan dalam hukum yang sama rata tanpa memandang status sehingga tercapainya hak Rakyat yang adil. Pemerintah dan Rakyat mempunyai hubungan yang erat dan akan selalu saling membutuhkan satu sama lain. Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab terhadap negaranya pasti akan menghasilkan hubungan timbal balik yang baik antara Pemerintah dan Rakyatnya.

Fungsi hubungan timbal balik Pemerintah dan Rakyat dari konsep siyasah dusturiyah adalah menjaga Rakyat supaya Pemerintah berbuat adil dalam memberikan hak-haknya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan secara terperinci dan matang akan membuat hubungan timbal balik dalam konsep siyasah dusturiyah berjalan sesuai dengan kemaslahatan Rakyat.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan/narasumber tentang persepsi mahasiswa generasi Z prodi Hukum Tata Negara dalam membahas hak dan kewajiban, ”Berbicara tentang Hak dan Kewajiban menurut saya yang dijalankan saat ini ada beberapa yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah, tetapi ada beberapa hak dan kewajiban sudah diberikan secara baik oleh Pemerintah”.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Mohammad Faisal Amru, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa, 8 Mei 2023.

<sup>89</sup> Imam Mustaqim, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa 10 Mei 2023

”Hak adalah sesuatu yang sudah ada dimiliki sejak lahir oleh rakyat dan harus dipenuhi oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang dan kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib diikuti oleh Rakyat selama kewajiban yang diberikan dengan baik”. Terciptanya hubungan timbal balik yang baik apabila Pemerintah membuat kebijakan dengan cara yang bertanggung jawab dan penuh dengan kehati-hatian dalam mempertimbangkan suatu aturan.

Mengenai hak dan kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah tidak seluruhnya hanya kesalahan oleh pihak Pemerintah ”karena hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat masih jauh untuk dikatakan berjalan dengan baik karena ada ketidaksesuaian hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing pihak, Karena itu kita perlu sama-sama dalam memperbaiki dan mengevaluasi diri”.<sup>90</sup>

Hasil dari Pemahaman dan Persepsi Terhadap Hubungan Timbal Balik Dalam Konsep Dusturiyah ialah mahasiswa menjelaskan tentang hak dan kewajiban Pemerintah dan Rakyat diantaranya adalah menjamin sistem hukum yang adil, Melaksanakan amanat undang-undang, Mensejahterakan Rakyat, melindungi Rakyat, Memelihara keutuhan wilayah dan aset-aset negara. Setiap negara sangat diperlukan rasa hasrat untuk melakukan pembangunan yang terus berkembang dan hasrat dalam keinginan negara untuk maju.

---

<sup>90</sup>Ditha Afrida, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa 10 Mei 2023

### **c. Persepsi Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara Terhadap Aspirasi rakyat**

Aspirasi dalam KBBI adalah harapan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang, Maka berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa generasi Z prodi Hukum Tata Negara membahas tentang bagaimana persepsi mahasiswa terhadap aspirasi rakyat saat ini.

”Ada aspirasi yang ditampung baik oleh Pemerintah dan ada yang tidak ditampung secara baik oleh Pemerintah, Karena setau saya ada rancangan RKHUP yang membahas tentang larangan untuk mengkritik menurut saya ini juga salah satu yang melanggar hak dan kewajiban kita sebagai Rakyat kepada Pemerintah. Walaupun hal ini masih dalam tahap rancangan ini terlihat bahwa Pemerintah sama sekali tidak ingin di kritik oleh Rakyat, Padahal untuk membangun hubungan timbal balik antara Pemerintah Dan Rakyat dengan baik adalah salah satunya dengan menampung aspirasi rakyat sebaik mungkin”.<sup>91</sup>

Menampung aspirasi Rakyat dengan baik adalah bentuk dari hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat adalah interaksi hubungan timbal balik yang sangat dekat, hal ini dikarenakan menampung aspirasi Rakyat adalah sebuah keharusan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Rakyatnya. Penyampaian aspirasi Rakyat tidak hanya akan melalui musyawarah saja namun akan terus berlanjut sehingga dilakukan rapat oleh Pemerintah yang terkait bertanggung jawab agar aspirasi Rakyat bisa diproses dengan sebaik mungkin.

---

<sup>91</sup>Basma Hajar Asri Tiba, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa 10 Mei 2023

Penampungan aspirasi Rakyat saat ini juga banyak disampaikan oleh Rakyat melalui teknologi internet sehingga banyak dari Pemerintah juga merasa terbantu melalui internet karena untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban Rakyat sudah berjalan dengan semestinya. Setiap Rakyat diberikan hak dalam memberikan aspirasi pendapatnya selama dilakukan secara bijak dan memperhatikan kesopanan dalam menyuarakan aspirasinya dan tidak dibenarkan bagi Pemerintah dalam mencegah aspirasi Rakyat.

”Menurut saya Pemerintah saat ini masih belum menampung aspirasi dengan baik, karena contohnya ketika saya membuka aplikasi internet *TikTok* kemarin masih banyak rakyat yang mengeluh tentang prasarana yang dibangun dengan tidak baik”<sup>92</sup>. Adapun narasumber lainnya yang juga menyampaikan bahwa ”saat ini masih bisa kita lihat lewat sosial media bagaimana aspirasi rakyat masih banyak yang harus disuarakan melalui sosial media hingga *viral* terlebih dahulu baru aspirasi tersebut dijalankan dengan baik”<sup>93</sup>.

”Saat ini juga banyak aspirasi rakyat masih banyak yang tidak ditampung dengan baik, kalau kita melihat keadilan Pemerintah dalam memberikan hak dan kewajiban di tv dan di internet sekarang ada banyak oknum Pemerintah yang memanfaatkan jabatannya”<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup>Ditha Afrida, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa 10 Mei 2023

<sup>93</sup> Arnida, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa 10 Mei 2023

<sup>94</sup>Muhammad Yunus, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa 8 Mei 2023

Dalam Undang-Undang Dasar negara 1945 untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menjamin peraturan juga keutuhan bangsa agar mempunyai kekuatan hukum maka Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus memiliki landasan, Dengan landasan yang kuat sebagai dasar terbentuknya Perundang-Undangan akan memiliki kekuatan untuk mengikat dan mengatur Rakyat dalam negara.

Melihat dari deskripsi temuan peneliti kepada narasumber dalam menyampaikan Persepsi Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara Terhadap Aspirasi rakyat menunjukkan bahwa mahasiswa generasi Z Hukum Tata Negara memahami dengan betul akan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat dalam konsep siyasah dusturiyah dimana hak dan kewajiban terhadap rakyat diberikan secara sebaik mungkin dan dijalankan dengan baik dan memberikan hak dan kewajiban kepada Rakyat secara bijak dan mencapai kemaslahatan. Mahasiswa generasi Z tanpa ragu langsung menjawab fenomena dan realita yang terjadi sebenarnya.

#### **d. Hubungan Timbal Balik Di Indonesia Saat Ini Apakah Sudah Sesuai Dengan Konsep Siyasah Dusturiyah**

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan/narasumber yang membahas tentang hubungan timbal balik di indonesia saat ini apakah sudah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah.

“Hubungan timbal balik yang terjadi di Indonesia saat ini kalau ditanya apakah sudah berjalan dengan baik masih ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki karena seperti contoh pada masa pandemi covid-19 Pemerintah

mengambil langkah yang kurang tepat karena disaat sedang krisis ekonomi akibat kurangnya pemasukan Pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan BBM padahal Rakyat dalam tahap krisis sedangkan Pemerintah dan presiden gajinya semakin naik ini termasuk hubungan timbal balik yang tidak menguntungkan, hal ini membuat rakyat dirugikan”<sup>95</sup>.

Tanggapan lainnya dari mahasiswa generasi Z prodi Hukum Tata Negara terhadap hubungan timbal balik di Indonesia saat ini “menurut saya ada beberapa hak dan kewajiban itu dijalankan dengan baik dan ada yang tidak, karena masih ada rakyat yang kesejahteraannya terganggu karena pemerintah yang tidak amanah. Seperti kasus korupsi di Indonesia yang semakin meningkat menjadi permasalahan karena ada hak rakyat yang harusnya berada ditangan rakyat tapi malah ada oknum Pemerintah yang tidak amanah”<sup>96</sup>.

Dan salah satu hasil wawancara peneliti kepada informan/narasumber yang membahas hubungan timbal balik di Indonesia salah satu yang dijalankan dengan baik pembangunan jalan “saya tinggal di PTP jadi Pemerintah membutuhkan tanah, karena ada beberapa tanah yang ditempati oleh warga Pemerintah memberikan hak ganti rugi kepada warganya atas tanah yang diperlukannya, menurut saya ini salah satu contoh terdekat yang saya alami”<sup>97</sup>.

Salah satu hak dan kewajiban yang sudah banyak terlaksana dengan baik di Indonesia adalah kewajiban Rakyat dalam membayar pajak namun hal

---

<sup>95</sup>Muhammad Yunus, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa, 8 Mei 2023

<sup>96</sup>Basma Hajar Asri Tiba, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa, 10 Mei 2023

<sup>97</sup>Muhammad Mustaqim Albar, Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara, wawancara pribadi, Langsa, 10 Mei 2023.

membayar pajak saat ini juga sedang memenuhi pro dan kontra yang disebabkan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, Dan Penagihan Pajak yaitu Rafael Alun Trisambodo terbukti dalam kasus korupsinya sejumlah Rp. 1,3 miliar<sup>98</sup>. Selain kasus korupsi yang masih susah diberantas di Indonesia ada juga kasus pelanggaran HAM, tidak taat dalam urusan lalu lintas, dan aspirasi Rakyat yang dibungkam juga salah satu bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban di Indonesia.

Dalam hubungan Pemerintah dan Rakyat yang diperlukan adalah dukungan Rakyat, Pemerintah dan Rakyat perlu untuk saling bekerjasama dalam kelangsungan sebuah ketatanegaraan. Dari hal ini dapat di simpulkan bahwa Pemerintah mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi perilaku Rakyatnya. Pemerintahan yang baik maka akan menimbulkan hubungan timbal balik yang baik terhadap Rakyatnya.

Disimpulkan bahwa pelanggaran hak dan kewajiban Pemerintah dan Rakyat di Indonesia tidak berjalan dengan baik maka dampak yang dihasilkan adalah ketidakadilan juga ketimpangan diberbagai bidang sehingga kehidupan sosial Rakyat menjadi kurang harmonis dan tidak membawa kemaslahatan kepada Rakyat. Dari hasil penelitian peneliti juga menemukan ada beberapa faktor yang membuat hak dan kewajiban tidak berjalan dengan baik di Indonesia:

---

<sup>98</sup> Aprilio Akbar, "KPK tahan Rafael Alun Trisambodo 'mantan pejabat pajak' dalam kasus dugaan gratifikasi", *bbc.com/indonesia/indonesia-64879826*, (8 Maret 2023), diakses 23 juni 2023.

1. Pemerintah yang masih egois dalam membuat kebijakan.
2. Kurangnya empati Rakyat terhadap kebijakan yang telah dibuat.
3. Rendahnya kesadaran Rakyat dalam berbangsa dan bernegara.
4. Sikap tidak toleran Pemerintah terhadap Rakyat
5. Beberapa aspirasi Rakyat yang tidak diterima dengan baik.
6. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah.

Maka dari hal ini solusi yang dibutuhkan pada hubungan timbal balik pada pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia adalah dengan meningkatkan rasa *awareness* (kesadaran) pada mahasiswa generasi Z yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa dalam memahami proses hubungan timbal balik di Indonesia saat ini. Selain itu juga perlunya dari Pemerintah dalam meningkatkan *profesionalisme* lembaga pertahanan dan keamanan negara dengan cara menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif dalam meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Rakyat yang saling memahami dan menghormati.

Dari sini peneliti juga melihat deskripsi temuan peneliti kepada narasumber bahwa Kedudukan siyasah dusturiyah di Indonesia adalah penerpan kebijakan pada Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengaruh dalam Hubungan Timbal Balik antara Pemerintah dan Rakyat dalam Konsep Dusturiyah di Indonesia ada beberapa kebijakan yang sudah cukup dijalankan dengan baik walaupun masih banyak kebijakan Pemerintah yang dalam pembuatannya merugikan dan melanggar kepentingan dan hak Rakyat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemahaman mahasiswa generasi Z fakultas syariah iain Langsa tentang hubungan timbal balik Pemerintah dan Rakyat dalam konsep dusturiyah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahasiswa generasi Z saat ini adalah sebagai generasi yang akan membawa perubahan terkhusus kepada mahasiswa Hukum Tata Negara maka sudah sepatutnya harus memahami hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat dalam konsep siyasah dusturiyah hal ini dikarenakan fungsi mahasiswa adalah sebagai agent of change yang harus mampu membawa dampak positif dan konstrusif melalui perkembangan teknologi dan juga membawa perubahan untuk bangsa dan negara. Maka dalam hasil wawancara peneliti kepada informan/narasumber menghasilkan temuan bahwa mahasiswa generasi Z Hukum Tata Negara memahami dengan baik maksud dari hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam konsep dusturiyah bahwa hubungan timbal balik dalam konsep siyasah dusturiyah adalah Pemerintah memberikan hak dan kewajibannya kepada Rakyat dengan sebaik mungkin sehingga mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan kepada rakyatnya.
2. Hubungan timbal balik di Indonesia sudah sesuai dengan memberikan hak dan kewajiban dalam aturan perundang-undangan hanya saja dalam menjalankannya masih ada oknum Pemerintah yang memanfaatkan

jabatannya dan kekuasaannya dalam memberikan hak dan kewajibannya kepada rakyat sehingga beberapa kali rakyat mengalami kesusahan akibat kelakuan oknum Pemerintah yang memanfaatkan jabatannya dan bahwa kedudukan siyasah dusturiyah di Indonesia adalah penerpan kebijakan pada Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah. Juga daripada itu dibutuhkannya dari Pemerintah dalam meningkatkan *profesionalisme* lembaga pertahanan dan keamanan negara dengan cara menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif dalam meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Rakyat yang saling memahami dan menghormati.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Pemahaman Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah Iain Langsa Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah Dan Rakyat Dalam Konsep Dusturiyah, peneliti ingin memberikan saran yang berhubungan dengan penelitian ini, kepada pihak mahasiswa Hukum Tata Negara untuk terus belajar dan mengevaluasi perkembangan diri dan belajar untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar karena sesuai dengan visi dan misi Hukum Tata Negara yaitu "Terwujudnya pendidikan Hukum Tata Negara Islam yang berkarakter *Rahmatan Lil 'alamin* dan melahirkan sarjana yang menguasai fikih dan Perundang- Undangan secara integratif", Juga untuk selalu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan menyerap informasi secara bijak.